

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru)

Ratna Arisandi¹, Hery Nariyah², Nursahidin³

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

ABSTRAK

Lahan TPAS yang sangat terbatas mengakibatkan menumpuknya sampah-sampah di TPS salah satunya TPS Terminal Weru yang diperuntukkan untuk tempat pembuangan sampah pedagang pasar. Namun, selain pedagang banyak masyarakat Weru yang membuang sampah di TPS tersebut yang mengakibatkan menumpuknya sampah liar di sekitar TPS tersebut. Penelitian ini dilakukan dan bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan dan mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang berwenang menangani hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. Studi kepustakaan diperoleh dari referensi buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, karya ilmiah, internet dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (studi kasus Tempat Penampungan Sampah Terminal Weru) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya dimensi komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

Latar Belakang Masalah

Globalisasi membawa hubungan antar negara semakin dekat serta membawa dampak yang positif dan negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat dari globalisasi adalah berkembangnya pusat-pusat industri yang dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan jika tidak ditangani

dengan tepat. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah masalah sampah. Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia (Manik, 2009:67). Karena tidak seimbang sumber daya

yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat. Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Secara ekonomis masalah sampah juga berkaitan dengan persoalan retribusi sampah. Masalah yang sering dijumpai adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Ini dikarenakan masyarakat yang masih kurang sadar untuk membayar retribusi sampah.

Permasalahan sampah terjadi di Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon merupakan wilayah yang sangat luas yang memiliki luas wilayah 990,36 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.126.179 jiwa. Di Kabupaten Cirebon, tumpukan sampah banyak menimbulkan masalah, selain mengganggu pemandangan dan lingkungan juga mengganggu kenyamanan bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Perbandingan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan jumlah sampah yang diolah tidak seimbang. Kabupaten

Cirebon termasuk Daerah yang sudah maju dan cukup pesat pembangunannya termasuk dalam hal industri dan perdagangan. Hal ini menyebabkan semakin banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Cirebon dalam kenyataannya tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih banyak sampah di Kabupaten Cirebon yang menumpuk dan tidak diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi *leading sector* berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Keberadaan sampah yang menumpuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terletak di terminal Weru tentunya sangat tidak memberikan kenyamanan bagi warga setempat. TPS di terminal Weru diperuntukkan untuk pedagang pasar namun banyak warga yang membuang sampah liar di sekitar TPS tersebut sehingga intensitas

pembuangan sampah di TPS tersebut terus meningkat yang menyebabkan kapasitas tempat pembuangan sampah di TPS tersebut tidak dapat menampung sampah. Hal ini semakin tidak memberikan kenyamanan bagi warga dan pedagang sekitar akibat bau tidak sedap yang ditimbulkan dari tumpukan sampah. Keterbatasan alat angkut sampah dan lokasi Tempat Penampungan Akhir Sampah (TPAS) yang jauh dari lokasi TPS pun menjadi masalah karena dalam proses pengangkutan sampah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat dibuang dan diproses hingga ke TPA. Anggaran yang tersedia dalam pengelolaan sampah tidaklah mampu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang ada ditambah dengan masih kurangnya petugas pengelola kebersihan.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan penelitian dengan cara yaitu menggambarkan masalah-masalah yang sinergis saat penelitian dilakukan.

Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yaitu dengan cara *purposive Sampling* artinya pengambilan sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan (Sugiyono, 2017:85).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi:

1. Studi kepustakaan
2. Studi Lapangan
 - a. Observasi
 - b. Wawancara. (Sugiyono 2017:226-240)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dokumentasi.

Teknik Pengujian Keabsahan Data

Penulis melakukan keabsahan data dengan melakukan teknik triangulasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Aktivitas dalam analisis data yaitu: data *reduction* (reduksi data), data *display*, *conclusion drawing/verivication*.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2014:19) Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya

seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau

Definisi Implementasi Kebijakan

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:148) mendefinisikan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).

Model Implementasi Kebijakan

Edwards III dalam Subarsono (2013:90-92) mengemukakan bahwa terdapat 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumberdaya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

A. Komunikasi

Menurut Edwards Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok

sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Namun, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon komunikasi yang dilakukan melalui penyaluran informasi kepada masyarakat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan optimal.

B. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon belum optimal karena keterbatasan sumberdaya.

C. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Disposisi atau sikap para pelaksana mempunyai

konsekuensi yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berupaya semaksimal mungkin memberikan kenyamanan kepada para petugas kebersihan. Menurut peneliti, dalam indikator disposisi tidak ada permasalahan yang signifikan yang ditemukan, hal tersebut masih wajar dan sesuai.

D. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedurs* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Terdapat SOP dalam pengelolaan sampah, namun dalam prakteknya SOP tersebut kurang dapat berjalan dengan maksimal.

Hambatan-hambatan yang Dihadapi

1. Kurangnya Sumberdaya
2. Terbatasnya Fasilitas Lahan Pembuangan Sampah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat

Upaya-upaya yang Dilakukan

1. Mengajukan proposal ke provinsi terkait sarana pengangkutan

sampah dan alat berat untuk Tempat Penampungan Akhir Sampah (TPAS).

2. Penyediaan alat insenarator (pemusnah sampah) yang diprogramkan oleh Bupati untuk di setiap desa, namun belum berjalan sepenuhnya di setiap desa.
3. Membuat bank sampah di beberapa daerah. Bank sampah merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang dimana sampah dipilah terlebih dahulu untuk dikelola.
4. Melakukan Sosialisasi setiap satu bulan sekali mengenai pengelolaan sampah ke setiap kecamatan.
5. Membuat spanduk larangan membuang sampah sembarangan.

KESIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon memiliki 4 (empat) dimensi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari keempat dimensi tersebut dimensi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum optimal.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya sumberdaya, terbatasnya fasilitas lahan pembuangan sampah, kurangnya kesadaran masyarakat
3. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu mengajukan proposal ke provinsi terkait sarana dan prasarana pengelolaan sampah, penyediaan alat insenerator yang diprogramkan oleh bupati untuk desa, membuat bank sampah di beberapa daerah, melakukan sosialisasi, pemasangan spanduk larangan membuang sampah sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Basriyanta. 2011. *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Irianto, Koes. 2010. *Kesehatan Masyarakat*. Bandung: Epsilon Group.
- Manik, Karden E. Sontang. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan.
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyono. 2014. *Membuat MOL dan Kompos dari Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: Agromedia Pustaka
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sejati, Kuncoro. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu: dengan Sistem Node, Sub Point, Center Point*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Noer. 2013. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Suryati, Teti. 2014. *Bebas Sampah dari Rumah*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Sutrisno, Edy. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Edisi dan Revisi: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah

Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon
Nomor 74 Tahun 2016 tentang
*Fungsi, Tugas Pokok dan Tata
Kerja Dinas Lingkungan Hidup*

Sumber Lain

Profil Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon

Data Kepegawaian Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Cirebon Tahun
2018

Badan Standardisasi Nasional (SNI 19-

2454-2002). 2002. *Tata Cara
Pengelolaan Sampah di
Permukiman*. Jakarta: Departemen
Pekerjaan Umum.

Badan Standardisasi Nasional (SNI 03-
3242-2008). 2002. *Tata Cara
Teknik Operasional Pengelolaan
Sampah Perkotaan*. Jakarta:
Departemen Pekerjaan Umum.

<https://cirebonkab.bps.go.id> Diakses 6
Februari 2018 Pukul 19.37 WIB

<https://cirebonkab.go.id> Diakses 18
April 2018 Pukul 20.14 WIB